

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011–2014**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



**Oleh:
SANTIKA ADHI KARYADI
15812147034**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011-2014**

SKRIPSI

OLEH:

**SANTIKA ADHI KARYADI
15812147034**

Telah disetujui dan disahkan
pada tanggal 03 Mei 2017

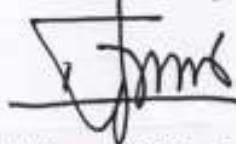
Untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA
NIP. 19630624 199001 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2014

Disusun oleh:
SANTIKA ADHI KARYADI
15812147034


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Mei 2017 dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dra. Isroah M.Si	Ketua Penguji		22/6/17
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA	Sekretaris Penguji		22/6/17
M. Djazari, M.Pd.	Penguji Utama		20/6/17

Yogyakarta, 22 Juni 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan




Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santika Adhi Karyadi
NIM : 15812147034
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Penulis



Santika Adhi Karyadi
15812147034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
- Siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu maka akan mendapatkan apa yang diinginkannya (Man Jadda Wajada)
- Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

- Tuti Yuliani dan Drs. Sukaryadi. Ibu dan ayah terhebat yang selalu memberikan semangat, doa, limpahan kasih sayang, dukungan dan motivasi tanpa henti.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011-2014**

Oleh:
SANTIKA ADHI KARYADI
15812147034

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. (2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. (3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. (4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif. Data penelitian terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal yang berasal dari laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 yang berjumlah 32 Kabupaten dan Kota. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,783; koefisien determinasi (r^2_{x2y}) 0,614; $t_{hitung}13,217 > t_{tabel}1,98137$. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x2y}) sebesar 0,658; koefisien determinasi (r^2_{x2y}) 0,433; $t_{hitung}9,168 > t_{tabel} 1,98137$. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x3y}) sebesar 0,166; koefisien determinasi (r^2_{x3y}) 0,028; $t_{hitung}1,770 < t_{tabel} 1,98137$. (4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,864; koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) 0,747; $F_{hitung}106,184 > F_{tabel} 2,69$.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

THE IMPACT OF LOCALLY-GENERATED REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS TOWARD CAPITAL EXPENDITURE OF DISTRICTS AND CITIES IN CENTRAL JAVA IN 2011-2014

By:
SANTIKA ADHI KARYADI
15812147034

ABSTRACT

The aims of this research are: (1) to know the impacts of Locally-Generated Revenue towards capital expenditure of districts and cities in Central Java in 2011-2014. (2) To know the impacts of General allocation fund toward capital expenditure of district and cities in Central Java in 2011-2014. (3) To know the impacts of special allocation funds toward capital expenditure of district and cities in Central Java in 2011-2014. (4) to know the impacts of both locally-generated revenue, general allocation fund, and special allocation funds altogether towards capital expenditure of districts and cities in Central Java in 2011-2014.

This is a causal comparative reaserch. Where the data of locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Funds and Capital Expenditure were taken from Regional Government Budget realizationof districts and cities in Central Java (2011-2014), as retrived from Directorate-General of Regional Fiscal Balance's official website. The population in this research covers all districts and cities in Central Java(2011-2014), in which 32 districts and regions were covered. Documentation method was used in this reaserch, with precondition test analysis were conducted through normality test, multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity test. Also, hypothesis testing in this reaserch used linier regression equatio, and multiple linier regressions

From the findings, it show that: (1) locally-Generated Revenue has a significant and positive effect in capital expenditureof districts and cities in central java in 2011-2014, decepted as 0,783 in coefficient correlation number (r_{x1y}); and 0,614 in coefficient of determination (r^2_{x1y}); $t_{counted}13,217 > t_{table} 1,98137$. (2) General Allocation Fund has a significant and positive effect in capital expenditureof districts and cities in central java in 2011-2014, decepted as 0,658 in coefficient correlation number (r_{x2y}); and 0,433 in coefficient of determination (r^2_{x2y}); $t_{counted}9,168 > t_{table} 1,98137$. (3) Special Allocation Funds has a significant and positive effect in capital expenditureof districts and cities in central java in 2011-2014, decepted as 0,166 in coefficient correlation number (r_{x3y}); and 0,028 in coefficient of determination (r^2_{x3y}); $t_{counted} 1,770 > t_{table} 1,98137$. (4) both Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Funds have significant and positive effect altogether towards capital expenditureof districts and cities in central java in 2011-2014, as depicted as 0,864 in coefficient correlation number ($R_{y(1,2,3)}$); and 0,747 in coefficient of determination ($R^2_{y(1,2,3)}$); $F_{counted}106,184 > F_{table} 2,69$.

Keywords: *Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Capital Expenditure.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SwT., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Abdullah Taman, M.Si., Ak. Dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak M. Djazari, M.Pd. narasumber yang telah bersedia memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Isroah M.Si., Ketua penguji yang telah memberikan masukan tambahan atas skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi dan Prodi Akuntansi.
7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungannya kepada penulis baik secara material, teknis maupun spiritual, yang tidak bisa disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan dalam skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 24 Mei 2017
Penulis,



Santika Adhi Karyadi
15812147034

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
1. Belanja Modal	13
a. Pengertian Belanja Modal.....	13
b. Peran Belanja Modal.....	14
c. Jenis-jenis Belanja Modal.....	15
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal	17
2. Pendapatan Asli Daerah	19
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	19
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah	20

3.	Dana Alokasi Umum	24
a.	Pengertian Dana Alokasi Umum	24
b.	Tahapan-tahapan Menghitung Dana Alokasi Umum	25
c.	Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum.....	26
4.	Dana Alokasi Khusus	27
a.	Pengertian Dana Alokasi Khusus	27
b.	Kebijakan Dana Alokasi Khusus	27
c.	Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus.....	29
d.	Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus	30
B.	Penelitian yang Relevan.....	34
C.	Kerangka Berpikir.....	37
D.	Paradigma Penelitian.....	39
E.	Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
A.	Desain Penelitian.....	41
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	41
C.	Populasi dan Sampel	41
D.	Definisi Operasional Variabel.....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	44
F.	Teknik Analisis Data.....	44
1.	Uji Asumsi Klasik	44
a.	Uji Normalitas.....	45
b.	Uji Multikolinieritas	45
c.	Uji Autokorelasi.....	46
d.	Uji Heterokedastisitas	47
2.	Uji Hipotesis	48
a.	Analisis Regresi Linier Sederhana.....	48
b.	Analisis Regresi Linier Berganda	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
A.	Hasil Penelitian	55
1.	Data Umum	55

2. Data Khusus	56
3. Analisis Data	59
a. Uji Asumsi Klasik.....	59
1) Uji Normalitas.....	59
2) Uji Multikolonieritas.....	62
3) Uji Autokorelasi.....	63
4) Uji Heterokedastisitas	63
b. Uji Hipotesis	64
1) Analisis Regresi Linier Sederhana	64
2) Analisis Regresi Linier Berganda	70
B. Pembahasan.....	73
C. Keterbatasan Penelitian.....	78
BAB V.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Formulasi untuk Menghitung Besarnya DAU	26
2. Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson.....	47
3 Jumlah data yang dapat digunakan untuk penelitian.....	56
4 Rangkuman Data Khusus	57
5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	61
6 Hasil Uji Multikolinieritas	62
7 Hasil Uji Autokorelasi.....	63
8 Uji Heteroskedastisitas.....	64
9 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah	65
10 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Umum.....	67
11 Hasil Uji regresi linier sederhana variabel Dana Alokasi Khusus	69
12 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Variabel Belanja Modal.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Paradigma Penelitian	39
2 Grafik Histogram Normalitas	59
3 Uji Normalitas dengan Normal P-Plot.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal.....	84
2. Hasil Analisis Regresi.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan kebijakan Umum (KUA) APBD dan prioritas serta plafon

Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa asset tetap (Syukriy Abdullah). Belanja Modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan asset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF), kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengalokasian asset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001)

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2010 sampai 2014 memperlihatkan belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata dari 2010 sampai

2014 sebesar 43,75 persen sedangkan porsi Belanja Modal rata-ratanya hanya 23,92 persen (republika.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal yang seyogianya berpengaruh besar terhadap pembangunan justru mendapatkan porsi kecil.

Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya dukungan dari faktor-faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu faktornya adalah keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang menjadi sumber finansial bagi penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo; 2002). Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut

Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Dari data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah seperti Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang.

Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2008) menunjukkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Dari data Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kenaikan DAU tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal

Dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Gambaran Dana Alokasi Khusus secara umum masih memiliki banyak kendala. Program Dana Alokasi Khusus telah menyalurkan dana untuk percepatan di 19 bidang pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat Indonesia. Besaran Dana Alokasi Khusus dari tahun ke tahun juga meningkat. Untuk tahun 2013 sebesar 31,697 Trilyun meningkat menjadi 33 Trilyun di tahun 2014. Dalam pelaksanaan di daerah ditemukan banyak kendala, sehingga serapan dana DAK maupun kinerja fisik kegiatan belum dapat dikatakan maksimal. Dilain hal, penyerapan program DAK terserap realisasinya rendah dan lambat.

Salah satu contoh anggaran Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup (LH) Tahun 2013 terjadi peningkatan anggaran sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 530.548.000.000 yang dialokasikan untuk 432 Kabupaten/Kota. Kemampuan Kabupaten/Kota dalam mengelola Dana Alokasi Khusus Bidang LH lebih baik dan tepat sasaran merupakan gambaran meningkatnya kinerja Dana Alokasi Khusus Bidang LH Kabupaten/Kota. Sementara di tahun yang

sama, alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan bagi daerah mencapai Rp.11 triliun lebih. Penggunaan untuk rehab bangunan, laboratorium, perpustakaan, hingga pengadaan buku. Dengan melihat perkembangan Dana Alokasi Khusus tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus. Meski pentingnya Dana Alokasi Khusus bagi perkembangan suatu daerah, namun masih banyak daerah yang setiap tahunnya tidak memanfaatkan Dana Alokasi Khusus yang disalurkan Pemerintah Pusat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dengan pejabat sebelumnya dan tidak mengetahui adanya penyaluran Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah Pusat, selain itu juga kurangnya pemahaman dalam menerapkan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus. Dari data DAK dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kenaikan DAK tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang.

Penelitian yang dilakukan Saptaningsih (2009) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh S.Y Mamonto dan Krest D.T (2015) menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil juga merupakan dana perimbangan. Dana Bagi Hasil

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dua jenis yaitu DBH pajak dan DBH Bukan Pajak. Dana Bagi Hasil ini merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupatendan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Selama ini belanja daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.
2. Pada tahun 2010 sampai 2014 belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata dari 2010 sampai 2014 sebesar 43,75 persen sedangkan porsi Belanja Modal rata-ratanya hanya 23,92 persen.

3. Masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.
4. Dari data PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa adanya kenaikan PAD, DAU, dan DAK tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Serapan dana DAK maupun kinerja fisik kegiatan pada daerah belum dapat dikatakan maksimal.
6. Masih banyak daerah yang setiap tahunnya tidak memanfaatkan Dana Alokasi Khusus yang disalurkan Pemerintah Pusat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, tentu diperlukannya pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Periode penelitian yaitu tahun 2011-2014.
2. Ruang lingkup permasalahan penelitian terkait Belanja Modal dibatasi hanya pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 ?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 ?
4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

2. Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.
4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.

- b. Bagi Pengembangan Ilmu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim: 2007). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Berdasarkan PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat 2 ditentukan bahwa nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa

Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan Belanja Modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan pada PP No. 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Khususnya PSAP No. 7. PSAP No. 7 ini mengatur tentang asset tetap dimana Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh asset tetap atau asset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

b. Peran Belanja Modal

Menurut PP No. 24 Tahun 2005, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja

Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. Untuk memperoleh asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Untuk memperoleh asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Secara teoritis terdapat tiga cara dalam memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan dengan cara membeli. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara membeli melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

c. Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Syaiful (2006), jenis-jenis Belanja Modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun

anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007:18) menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi Belanja Modal adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya secara parsial dan simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Adib Irsyadi (2014: 10) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah DAU, PAD, DAK, dan Silpa.

Dana transfer dari pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum ini merupakan transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi. Sesuai dengan PP No.55 Tahun 2005, penyaluran Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi Dana Alokasi Umum yang bersangkutan. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran Dana Alokasi Khusus ini ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Perbedaannya terletak pada sumber uang, Pendapatan Asli Daerah berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari dua pendapat mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dimana dana yang diperoleh dikelola oleh pemerintah daerah dan jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak pada setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah berbeda. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak kendaraan di atas air.
5. Pajak air di bawah tanah.
6. Pajak air permukaan.

Selanjutnya, jenis pajak Kabupaten/Kota tersusun atas:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah juga berperan sebagai penyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi pada provinsi berbeda dengan kabupaten/kota, terkait dengan UU No. 34 Tahun 2000. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
3. Retribusi penggantian biaya cetak peta
4. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP.
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil.
5. Retribusi pelayanan pemakaman.
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat.
7. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
8. Retribusi pelayanan pasar.
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

11. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 12. Retribusi pengujian kapal perikanan.
 13. Retribusi pemakainya kekayaan daerah.
 14. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan.
 15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.
 16. Retribusi jasa usaha terminal.
 17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.
 18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
 19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.
 20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.
 21. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.
 22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
 23. Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air.
 24. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.
 25. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
 26. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
 28. Retribusi izin gangguan.
 29. Retribusi izin trayek.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Penerimaan lain-lain

Pengertian Penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten Dan Kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan kota diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil

penjualan asset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

3. Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004)

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dari dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah.

DAU merupakan transfer yang bersifat *Block Grant* artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah.DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan Imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

b. Tahapan-tahapan Menghitung Dana Alokasi Umum

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR

RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan politis merupakan tahap akhir. Pembahasan perhitungan dana alokasi umum antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum.

c. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c. Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. (Bambang Kesit Prakosa, 2004)

Tabel 1 Formulasi untuk Menghitung Besarnya DAU

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x PDN
DAU suatu Provinsi: $\frac{\text{bobot seluruh provinsi yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh provinsi di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Provinsi}$		
DAU suatu Kabupaten dan Kota: $\frac{\text{bobot kabupaten dan kota yang bersangkutan}}{\text{bobot seluruh kabupaten dan kota di Indonesia}} \times \text{DAU untuk Kabupaten dan Kota}$		

Sumber: UU No. 25 Tahun 1999

4. Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian daerah dengan pengeluaranyang lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

b. Kebijakan Dana Alokasi Khusus

Menurut Departemen Keuangan, Kebijakan Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan.

7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

c. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

a. Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

b. **Kriteria Khusus**

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

c. **Kriteria Teknis**

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus.

2. Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus melalui dua tahapan, yaitu:
 1. Penentuan Daerah Tertentu yang menerima DAK; dan
 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
3. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

d. Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan arah kegiatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. **Dana Alokasi Khusus Pendidikan**

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Dana Alokasi Khusus Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

3. Dana Alokasi Khusus Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi/advokasi program KB, sarana dan prasarana di klinik KB, dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesehatan dan ketahanan keluarga.

4. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota

dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. Dana Alokasi Khusus Irigasi

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

6. Dana Alokasi Khusus Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (Air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. Dana Alokasi Khusus Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian ditingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional

8. Dana Alokasi Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan

pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus.

10. Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

11. Dana Alokasi Khusus Kehutanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung. Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana

penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

12. Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dna diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di pedesaan ke daerah pemasaran.

13. Dana Alokasi Khusus Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, darah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2004)

Penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2004) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Hasil dari Penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Syukriy Abdullah dan Abdul Halim adalah terletak pada variabel terikatnya. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Belanja Pemerintah Daerah, sedangkan pada penelitian penulis variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Selain itu perbedaannya penelitian Syukriy Abdullah dan Abdul Halim tidak menggunakan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas, sedangkan penelitian penulis menggunakan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas. Kemudian, persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim terletak pada variabel bebasnya yaitu Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penelitian oleh Saptaningsih Sumarmi (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih Sumarmi (2009) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi Belanja Modal. Pengujian secara parsial, variabel PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal daerah, sedangkan variabel dependen DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal daerah dalam APBD.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih Sumarmi adalah tempat penelitian yang

berbeda. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Saptaningsih Sumarmi terletak pada variabel bebasnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Penelitian oleh Arbie Gugus Wandira (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012). Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel PAD, DAU, dan DAK sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan DBH sebagai variabel dependen sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak menggunakan variabel tersebut, serta lingkup dan tahun dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi se Indonesia tahun 2012 sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencakup Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010-2013.

C. Kerangka Berpikir

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Belanja Modal sangat penting sehingga perlu didukung oleh beberapa faktor tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum pendapatan pengeluaran. Sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, namun kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar. Setiap penyusunan APBD, alokasi Belanja Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Pendapatan Asli Daerah ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya peningkatan dari

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

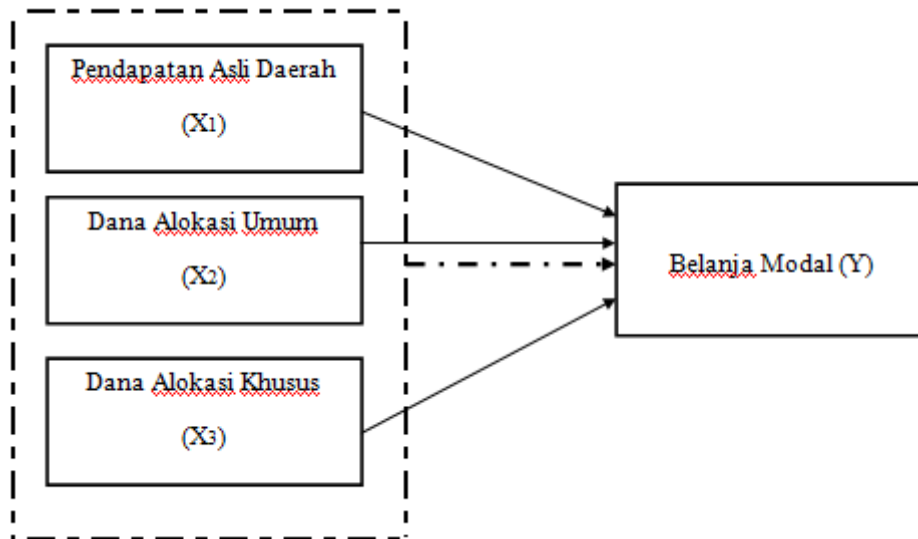
Faktor lain yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Dana Alokasi Umum juga merupakan salahsatu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikannya untuk membiayai Belanja Modal.

Dana perimbangan lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara Belanja Modal dengan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan pendapat-pendapat dan pengertian dari masing-masing variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Modal.

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Keterangan:

—————> = Pengaruh Variabel X terhadap variabel Y secara individual

- . - . - .> = Pengaruh Variabel X terhadap variabel Y secara simultan

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kajian teori dan penelitian yang relevan yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif, yaitu berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti (Kuncoro, 2003 : 251). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil data laporan realisasi APBD selama periode 2011-2014. Data penelitian diunduh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id . Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari hingga April 2017.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan

seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto:2004). Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 23 daerah Kabupaten dan 5 daerah Kota sehingga total populasi adalah 28 data.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011:85) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2011-2014, dengan jumlah sampel sebanyak 32 daerah. Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $4 \times 28 = 112$ data.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan mesin, Belanja Modal gedung dan bangunan, Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Belanja Modal adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\
 & + \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} \\
 & + \text{Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \\
 & \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset} \\
 & \text{Lainnya}
 \end{aligned}$$

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dapat dirumuskan dengan:

$$\begin{aligned}
 \text{PAD} = & \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total} \\
 & \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \\
 & \text{lain – lain pendapatan daerah yang sah.}
 \end{aligned}$$

3. Variabel Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat ditentukan dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{DAU Kabupaten/Kota} = & 90\% \times 25\% \times \text{Pendapatan Dalam Negeri} \\
 & \times \text{Bobot DAU}
 \end{aligned}$$

4. Variabel Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011-2014. Data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis perlu dilakukan pengujian asumsi klasik karena data yang akan dimasukkan dalam model regresi berganda harus memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi berganda. Uji asumsi klasik tersebut antara lain adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik *non parametrik* Kolmogorov-Sminov (Imam Ghozali 2011:160). Metode yang lebih handal adalah *normal probability plot* yang membandingkan dari distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Bhuono Agung, 2005:58). Kemiripan antarvariabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan

dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$) (Sunyoto,2007:89).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Adapun uji yang digunakan untuk mencari masalah autokorelasi ini adalah uji *Durbin-Watson (DW test)*. *DW test* digunakan untuk korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Uji ini membandingkan antara hasil DW statistik dengan DW tabel. Guna mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi maka digunakan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi negatif atau positif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali (2011:111)

d. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan suatu keadaan terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Keadaan ini berarti bahwa varian dari setiap eror bersifat heterogen yang melanggar asumsi klasik bahwa syarat varians dari eror harus bersifat homogen. Seperti halnya masalah multikolinieritas, model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalamnya.

Pengujian terkait heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya, yaitu Uji Glejser, Uji Spearman's, Uji Park, dan melihat pola grafik regresi. Adapun uji heterokedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen (Ghozali, 2011:142). Apabila nilai signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 maka terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2009:261). Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal secara parsial. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

X = PAD atau DAU atau DAK

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Sumber: Sunyoto, 2007:10

Ghozali (2011:95) menyebutkan bahwa hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien korelasi (r) untuk mengukur besar kecilnya atau kuat tidaknya hubungan antara variabel-variabel apabila hubungannya linier. Nilai koefisien ini paling sedikit -1 dan paling

besar 1, sehingga bila koefisien korelasi dinyatakan sebagai berikut: $-1 \leq r \leq 1$.

Adapun rumus perhitungan korelasi yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Pengaruh variabel X terhadap Y

X = Nilai variabel X

Y = Nilai variabel Y

Sumber: Dermawan Wibisono. 2013: 233-234

Uji regresi linier sederhana menggunakan koefisien determinasi (r^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Mencari koefisien determinasi (r^2) antara prediktor X_1 , dengan Y, prediktor X_2 dengan Y, dan prediktor X_3 dengan Y dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$r^2_{(x_1y)} = \frac{(a_1 \sum X_1 Y)}{\sum X_1}$$

$$r^2_{(x_2y)} = \frac{(a_2 \sum X_2 Y)}{\sum X_2}$$

$$r^2_{(x_3y)} = \frac{(a_3 \sum X_3 Y)}{\sum X_3}$$

Keterangan:

$r^2_{(x_1y)}$: Koefisien determinasi antara Y dengan X_1

$r^2_{(x_2y)}$: Koefisien determinasi antara Y dengan X_2

$r^2_{(x_3y)}$: Koefisien determinasi antara Y dengan X_3

a_1 : Koefisien prediktor X_1

a_2 : Koefisien prediktor X_2

a_3 : Koefisien prediktor X_3

$\sum X_1 Y$: Jumlah produk X_1 dengan Y

$\sum X_2 Y$: Jumlah produk X_2 dengan Y

$\sum X_3 Y$: Jumlah produk X_3 dengan Y

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat kriterium Y

(Sumber: Hadi, 2004: 22)

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara individual terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal digunakan Uji t (*t-test*). Rumusnya sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai t hitung

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

(Sumber: Sugiyono, 2011: 250)

T-*test* ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (Bhuono Agung, 2005: 54). Nilai dari uji *t-test* dapat dilihat dari nilai t hitung. Hasil t_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} . Apabila nilai t_{hitung} sama dengan atau lebih besar dibandingkan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependensi signifikan dan sebaliknya.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, maka selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.

Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = *Slope* atau koefisien regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e = *Error*

(Sumber: Bhuono Agung, 2005:43)

Ghozali (2011:95) menyebutkan bahwa hasil dari analisis regresi dapat berupa koefisien. Koefisien ini dihitung dengan tujuan untuk meminimalkan penyimpangan antara nilai aktual serta menilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Koefisien korelasi ganda (R) adalah salah satu dari koefisien korelasi, koefisien korelasi ganda disimbolkan dengan $R_{x_1x_2x_3}$ dan merupakan ukuran keeratan hubungan antara variabel terikat dan semua variabel bebas. Rumus uji korelasi berganda:

$$R_{y(1,2,3)} = \sqrt{\frac{Ryx_1^2 + Ryx_2^2 + Ryx_3^2 - 2(Ryx_1)(Ryx_2)(Ryx_3)}{1 - Rx_1x_2x_3^2}}$$

Keterangan:

$R_{y(1,2,3)}$: Koefisien korelasi berganda antara X_1 , X_2 , dan X_3 dengan Y

Ryx_1^2 : Koefisien korelasi antara Y dengan X_1

Ryx_2^2 : Koefisien korelasi antara Y dengan X_2

Ryx_3^2 : Koefisien korelasi antara Y dengan X_3

$Rx_1x_2x_3x_4x_5^2$: Koefisien korelasi berganda (Sugiyono, 2011: 20).

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Koefisien determinasi dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara variabel independen dan dependen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 y_{(1,2,3)} = \frac{a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y + a_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

$R^2 y_{(1,2,3)}$: Koefisien determinasi antara Y dengan X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 secara bersama-sama.

a_1 : Koefisien prediktor X_1

a_2 : Koefisien prediktor X_2

a_3 : Koefisien prediktor X_3

$\sum X_1 Y$: Jumlah X_1 dengan Y

$\sum X_2 Y$: Jumlah X_2 dengan Y

$\sum X_3 Y$: Jumlah X_3 dengan Y

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat kriterium

(Hadi, 2004:22)

Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen sangat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji signifikansi regresi berganda menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali: 2011,98).

$$F = \frac{R^2(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Keterangan:

F : F hitung

N : Jumlah anggota sampel

M : Jumlah variabel independen

R^2 : Koefisien determinasi

(Sugiyono, 2011:295)

Pengambilan keputusan perhitungan uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika F_{hitung} sama dengan atau lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan. Signifikan disini berarti hipotesis diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 28 Kabupaten dan Kota. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berada di tengah pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan provinsi lainnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 28 Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Kab. Banjarnegara | 15. Kab. Purbalingga |
| 2. Kab. Banyumas | 16. Kab. Purworejo |
| 3. Kab. Blora | 17. Kab. Rembang |
| 4. Kab. Boyolali | 18. Kab. Semarang |
| 5. Kab. Brebes | 19. Kab. Sragen |
| 6. Kab. Cilacap | 20. Kab. Tegal |
| 7. Kab. Grobogan | 21. Kab. Temanggung |
| 8. Kab. Jepara | 22. Kab. Wonogiri |
| 9. Kab. Karanganyar | 23. Kab. Wonosobo |
| 10. Kab. Kebumen | 24. Kota Magelang |
| 11. Kab. Klaten | 25. Kota Pekalongan |
| 12. Kab. Magelang | 26. Kota Salatiga |
| 13. Kab. Pati | 27. Kota Semarang |
| 14. Kab. Pemasang | 28. Kota Surakarta |

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 112, data diperoleh dari laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2014 yang seluruhnya menyampaikan kepada situs Dirjen Perimbangan

Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011-2014. Setelah dilakukan seleksi data, maka dapat diketahui bahwa terdapat data *outliers* pada penelitian. Data *outliers* adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam satu rangkaian data. Data *outliers* yang memiliki karakteristik unik dihilangkan agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian ini.

Tabel 3 Jumlah data yang dapat digunakan untuk penelitian

Prosedur Penentuan Data	Jumlah
1. Laporan Realisasi APBD 2011-2014	140
2. Data <i>Outliers</i>	(28)
Total data yang dapat digunakan	112

Sumber: data sekunder yang diolah

2. Data Khusus

Pada penelitian ini terdapat empat data yaitu tentang Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Data tersebut terlampir dalam lampiran 1 halaman 82-90. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi.

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014, maka nilai

minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari variabel penelitian Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rangkuman Data Khusus

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	112	66386,00	800181,00	201559,2411	108115,56122
PAD	112	60611,00	1138367,00	172867,6161	153523,59279
DAU	112	262653,00	1291122,00	762873,9107	226873,48804
DAK	112	14993,00	823874,00	70865,4911	75066,99975
Valid N (listwise)	112				

Sumber: data sekunder yang diolah.

a. Belanja Modal

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1 halaman 84-88) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimalnya sebesar Rp. 66.386,00 diperoleh dari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar Rp. 800.181,00 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2014. Nilai *mean* Rp.201.559,2411 dan nilai standar deviasi 108.115,5612.

b. Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1 halaman 84-88) dengan bantuan program IBM SPSS

Statistics Version 20. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp. 60.611,00 diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2011, dan nilai maksimalnya sebesar Rp. 1.138.367,00 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2014. Nilai *mean* 172.867,6161 dan nilai standar deviasi 153523,5928.

c. Dana Alokasi Umum

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1 halaman 84-88) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimal sebesar Rp. 262.653,00 diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2011, dan nilai maksimalnya sebesar Rp. 1.291.122,00 diperoleh dari Kabupaten Cilacap tahun 2014. Nilai *mean* 762.873,9107 dan nilai standar deviasi 226873,4880.

d. Dana Alokasi Khusus

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran 1 halaman 84-88) dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics Version 20*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 112. Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimal sebesar Rp. 14.993,00 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2012, dan nilai

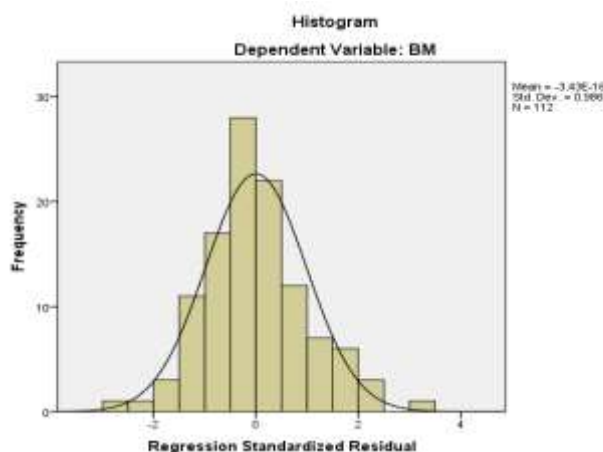
maksimalnya sebesar Rp. 823.874,00 diperoleh dari Kabupaten Blora tahun 2014. Nilai mean 70.865,4911 dan nilai standar deviasi sebesar 75066,99975.

3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dari hasil pengumpulan data sekunder untuk dilakukan uji normalitas, telah diperoleh grafik histogram seperti berikut:

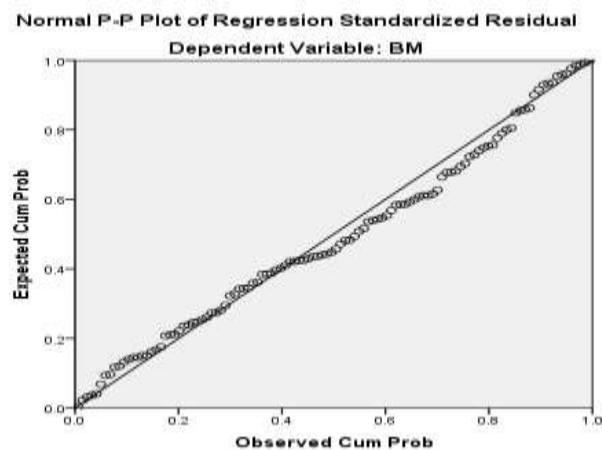


Gambar 2 Grafik Histogram Normalitas

Sumber: data sekunder yang diolah.

Dari tampilan grafik histogram normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang

kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residul akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residul normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Uji Normalitas dengan Normal P-Plot

Sumber: data sekunder yang diolah.

Pada grafik normal probability plot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik

Kolmogorov-Smirnov (K-S).uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05. Adapun uji normalitas dengan uji *one sample kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	54401.89817859
	Absolute	0,079
Most Extreme Differences	Positive	0,079
	Negative	-0,042
Kolmogorov-Smirnov Z		0,838
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,484

Sumber: data sekunder yang diolah.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel diatas, nilai Kolmogorov-Smirnov 0,838 dengan probabilitas signifikansi 0,484 lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Bhuono Agung, 2005:58). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas ini akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel independen melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$) (Sunyoto, 2007: 89). Adapun hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	DAK	PAD	DAU
DAK	1,000	0,161	
PAD	0,161	1,000	-0,457
DAU		-0,457	1,000

Sumber: data sekunder yang diolah.

Berdasarkan tabel 6, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai korelasi dari ketiga variabel independen, yaitu pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diatas lebih kecil dari 0,60. Menurut hasil tersebut

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji Durbin-Watson (D-W).

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,856

Sumber: data sekunder yang diolah.

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah data (n) 112 dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,7472 dan batas bawah (dL) 1,6373. Karena nilai DW 1,856 lebih besar dari batas atas (dU) 1,7472 dan kurang dari $4-1,7472$ ($4-dU$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas (Ghozali: 2011). Di dalam pengujian Uji *Glajser*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13393,269	11449,886		1,170	0,245
PAD	0,033	0,024	0,142	1,368	0,174
DAU	0,032	0,016	0,207	1,952	0,054
DAK	-0,032	0,045	-0,068	-0,717	0,475

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: data sekunder yang diolah.

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

b. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Sederhana

a) Uji Hipotesis Pertama

Melalui bantuan program IBM SPSS *Statistics Version* 20 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah

Variabel	Koefisien Regresi	$r_{x,y}$	$r^2_{x,y}$	Sig	t_{hitung}	Keterangan
Konstanta	106.197,036			0,000	11,027	
PAD (X ₁)	0,552	0,783	0,614	0,000	13,217	Signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah.

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 8 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 106.197,036 + 0,552X_1$$

Nilai konstanta sebesar 106.197,036, hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 106.197,036 jika Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,552, menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,552 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Pendapatan Asli Daerah (X₁) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_1y}) sebesar 0,783. Koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) sebesar 0,614 yang berarti 61,4% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah

dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 13,217 > t_{tabel} 1,98137$ menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014” dapat diterima.

b) Uji Hipotesis Kedua

Melalui program IBM SPSS *Statistics Version 20* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel berikut:

Tabel10 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Umum

Variabel	Koefisien Regresi	r_{x_2y}	$r^2_{x_2y}$	Sig	t_{hitung}	Keterangan
Konstanta	-37.702,379			0,169	-1,385	
DAU (X ₂)	0,314	0,658	0,433	0,000	9,168	Signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah.

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 9 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = -37.702,379 + 0,314X_2$$

Nilai konstanta sebesar -37.702,379, hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar -37.702,379 jika Dana Alokasi Umum sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,314, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,314 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Dana Alokasi Umum (X₂) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,658. Koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,433 yang berarti 43,3% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya 56,7% dipengaruhi oleh variabel lain selain Dana Alokasi Umum.

Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 9,168 > t_{tabel} 1,98137$ menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014” dapat diterima.

c) Uji Hipotesis Ketiga

Melalui program IBM SPSS *Statistics Version 20* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 Hasil Uji regresi linier sederhana variabel Dana Alokasi Khusus

Variabel	Koefisien Regresi	r_{x_3y}	$r^2_{x_3y}$	Sig	thitung	Keterangan
Konstanta	184.578,857			0,000	13,236	
DAK (X3)	0,240	0,166	0,028	0,080	1,770	Tidak Signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah.

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 10 dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 184.578,857 + 0,240X_3$$

Nilai konstanta sebesar 184.578,857, hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 184.578,857 jika Dana Alokasi Khusus sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,240, menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,240 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Dana Alokasi Khusus (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar 0,166. Koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,028 yang berarti 2,8% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Khusus, sedangkan sisanya 97,2%

dipengaruhi oleh variabel lain selain Dana Alokasi Khusus. Nilai signifikansi sebesar 0,080, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai $t_{hitung} 1,770 < t_{tabel} 1,98137$ menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) tidak signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah positif dan tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014” dapat diterima.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Melalui bantuan program IBM SPSS Statistics Version 20 diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel berikut:

Tabel 12 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Variabel Belanja Modal

Variabel Independen	Koefisien Regresi	$R_{y(123)}$	$R^2_{y(1,2,3)}$	Sig	F_{hitung}	Keterangan
Konstanta	-15.527,134	0,864	0,747	0,000	106,184	Signifikan
PAD (X_1)	0,446					
DAU (X_2)	0,167					
DAK(X_3)	0,182					

Sumber: data sekunder yang diolah.

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel 11 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut:

$$Y = -15.527,134 + 0,446X_1 + 0,167X_2 + 0,182X_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar -15.527,134 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1=0$, $X_2=0$, $X_3=0$), maka Belanja Modal tiap daerah sebesar -15.527,134.
- b) Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,446, artinya apabila terjadi

perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,446 atau 44,6%.

c) Koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah sebesar 0,167, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,167 atau 16,7%.

d) Koefisien Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 0,182, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,182 atau 18,2%.

Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,864, kemudian besarnya koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) adalah 0,747. Perhitungan hasil statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variasi perubahan variabel dependen sebesar 74,7%, sedangkan sisanya 25,3% ($100\% - 74,7\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Hasil pengujian statistik dengan uji F diterangkan melalui F_{tabel} sebesar 2,69 dan F_{hitung} sebesar 106,184, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya secara bersama-sama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Oleh karena itu, disimpulkan hipotesis keempat diterima.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”, terbukti Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($r_{x,y}$) sebesar 0,783. Koefisien determinasi ($r^2_{x,y}$) sebesar 0,614. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 13,217 > t_{tabel} 1,98137$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Saptaningih Sumarmi (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus terus dipacu pertumbuhannya. Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan Belanja Modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal dapat menjadi besar. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”, terbukti yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x2y}) sebesar 0,658. Koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,433 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki kontribusi pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar

43,3%. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 9,168 > t_{tabel} 1,98137$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modalakan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modalakan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Askam Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004) Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk member pelayanan publik yang lebih baik. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat

menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu hipotesis kedua diterima.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”, terbukti yaitu Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x3y}) sebesar 0,166. Koefisien determinasi (r^2_{x3y}) sebesar 0,028 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki kontribusi pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 2,8%. Nilai signifikansi sebesar 0,080, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Nilai $t_{hitung} 1,770 < t_{tabel} 1,98137$ maka Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal adalah positif namun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar cenderung memiliki Belanja Modal yang besar pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Isti Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu semakin besar Dana Alokasi Khusus maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal

Dengan uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal, membuktikan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,864. Koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,747. Hasil pengujian dengan uji F dengan nilai signifikansi

0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05, F_{tabel} yaitu 2,69 dan F_{hitung} sebesar 106,184 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti secara bersama-sama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saptaningsih Sumarmi (2009) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi Belanja Modal. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014” diterima.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya mengambil 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Periode yang diambil penelitian ini terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dalam periode empat tahun yaitu tahun 2011-2014.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien koeralasi ($r_{x,y}$) sebesar 0,783 dan koefisien determinasi ($r^2_{x,y}$) sebesar 0,614. Nilai $t_{hitung} 13,217 > t_{tabel} 1,98137$.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien koeralasi ($r_{x,y}$) sebesar 0,658 dan koefisien determinasi ($r^2_{x,y}$) sebesar 0,433. Nilai $t_{hitung} 9,168 > t_{tabel} 1,98137$.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien koeralasi ($r_{x,y}$) sebesar 0,166 dan koefisien determinasi ($r^2_{x,y}$) sebesar 0,028. Nilai $t_{hitung} 1,770 < t_{tabel} 1,98137$.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-

2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,864 dan koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,747. Nilai F_{hitung} sebesar $106,184 > F_{tabel} 2,69$.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten dan kota khususnya selain di Provinsi Jawa Tengah supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhuono Agung. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari.(2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*.Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Dermawan Wibisono. (2014). *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Duwi Priyatno. (2013). *Olah Data Statistik Dengan Program PSPP*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom.
- Hadi, S. (2004).*Analisis Regresi*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, D. & Adi, P.H. (2007).*Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per-Kapita*.SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Irsyadi, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kemenkeu.(2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Kemenkeu.(2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- Kemenkeu DJPK. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316. Pada tanggal 29 Desember 2016.
- .“Dana Alokasi Umum: Selayang Pandang”.
<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/DAU.pdf>. Pada tanggal 29 Desember 2016.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- _____. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Permatasari, I. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5, Nomor 1.
- Purwanto, F.P.D. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)*”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prakosa, B.A. (2004). “*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*”. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Volume 8 No 2, 101-118.
- Putro, N.S. (2008). “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Richard, A. & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD
- Sarangih, J.P. (2003). “*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*”. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiawan, A. (2010). “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*”. Skripsi. Universitas Negeri Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- _____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- _____. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- Sularno, F. M. (2013). “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*”. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Sumarmi, S. (2009). “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta*”.

Sunyoto, D. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta: Amara Books.

Syukriy Abdullah dan Abdul Halim.(2004). “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah*”. Simposium Nasional Akuntansi VI, hal 1140-1159.

Tuasikal, A. (2008). “*Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*”. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.1 No. 2 Juli 2008, hal 142-155.

Undang-undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.

Wandira, A.G. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)*”.Skripsi.Universitas Negeri Semarang.

www.djpk.depkeu.go.id. Diakses 24 Desember 2016 pukul 14.15 WIB.

Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zuraya,N. (2015). “*Optimalisasi APBD demi Pertumbuhan Daerah*”.Diambil dari www.republika.com.Pada tanggal 10 Februari 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
(dalam jutaan rupiah)

No.	Kab/Kota	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Dana Alokasi Umum(X ₂)	Dana Alokasi Khusus (X ₃)
1	Kab. Banjarnegara	160,076	71,107	562,288	65,367
2	Kab. Banyumas	169,316	191,900	835,610	93,892
3	Kab. Blora	105,829	67,022	547,170	77,094
4	Kab. Boyolali	138,437	96,738	641,483	67,161
5	Kab. Brebes	142,729	78,276	800,183	65,322
6	Kab. Cilacap	203,565	172,327	876,994	102,076
7	Kab. Grobogan	161,322	87,912	668,995	78,239
8	Kab. Jepara	212,928	103,642	592,164	70,692
9	Kab. Karanganyar	86,229	104,081	577,563	58,186
10	Kab. Kebumen	187,138	73,513	731,981	79,151
11	Kab. Klaten	130,546	72,291	793,293	80,954
12	Kab. Magelang	84,900	90,463	668,922	78,341
13	Kab. Pati	89,665	134,476	692,179	65,372
14	Kab. Pemasang	128,206	79,678	672,430	67,464
15	Kab. Purbalingga	66,386	94,946	521,932	67,533
16	Kab. Purworejo	87,865	88,942	585,851	60,942
17	Kab. Rembang	187,993	73,932	468,745	62,327
18	Kab. Semarang	160,539	133,199	567,856	69,002
19	Kab. Sragen	70,837	94,519	618,443	71,612
20	Kab. Tegal	145,856	90,133	703,779	61,333
21	Kab. Temanggung	93,034	63,343	482,938	57,034
22	Kab. Wonogiri	111,320	77,142	682,033	77,832
23	Kab. Wonosobo	119,761	67,399	485,766	62,281
24	Kota Magelang	81,027	63,558	292,580	24,342
25	Kota Pekalongan	82,344	63,345	293,530	24,675
26	Kota Salatiga	77,409	60,611	262,653	23,541
27	Kota Semarang	305,704	521,538	715,701	48,402
28	Kota Surakarta	128,443	181,097	473,889	34,895

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
(dalam jutaan rupiah)

No.	Kab/Kota	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Dana Alokasi Umum(X ₂)	Dana Alokasi Khusus (X ₃)
1	Kab. Banjarnegara	158,301	94,271	681,396	67,731
2	Kab. Banyumas	234,952	242,107	991,945	118,902
3	Kab. Blora	219,108	81,987	673,181	53,990
4	Kab. Boyolali	207,759	127,725	780,302	60,361
5	Kab. Brebes	192,983	101,807	981,051	84,451
6	Kab. Cilacap	308,872	196,673	1,057,808	87,652
7	Kab. Grobogan	190,075	105,463	812,991	97,055
8	Kab. Jepara	297,197	129,077	712,740	76,461
9	Kab. Karanganyar	122,761	116,707	720,919	55,514
10	Kab. Kebumen	295,209	102,374	906,222	100,103
11	Kab. Klaten	182,607	84,756	967,285	74,502
12	Kab. Magelang	95,351	123,723	816,733	103,595
13	Kab. Pati	174,150	163,734	850,377	80,449
14	Kab. Pemasang	128,367	97,951	827,163	92,869
15	Kab. Purbalingga	126,673	103,756	640,265	75,990
16	Kab. Purworejo	149,105	98,262	711,742	69,568
17	Kab. Rembang	200,204	103,305	570,455	78,351
18	Kab. Semarang	264,417	156,104	691,272	67,737
19	Kab. Sragen	125,506	127,696	778,668	69,378
20	Kab. Tegal	303,315	118,742	860,568	74,555
21	Kab. Temanggung	162,080	78,515	584,158	87,304
22	Kab. Wonogiri	185,814	100,037	828,480	75,052
23	Kab. Wonosobo	189,467	82,335	597,858	55,970
24	Kota Magelang	79,136	91,315	348,498	20,668
25	Kota Pekalongan	103,506	91,206	347,390	27,127
26	Kota Salatiga	124,905	77,799	325,710	27,640
27	Kota Semarang	351,854	779,617	936,866	72,271
28	Kota Surakarta	186,150	231,672	595,223	28,972

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
(dalam jutaan rupiah)

No.	Kab/Kota	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Dana Alokasi Umum(X ₂)	Dana Alokasi Khusus (X ₃)
1	Kab. Banjarnegara	175,918	98,975	763,427	69,483
2	Kab. Banyumas	313,189	308,349	1,127,940	78,663
3	Kab. Blora	260,455	95,193	753,830	53,493
4	Kab. Boyolali	249,112	160,752	871,686	59,234
5	Kab. Brebes	325,841	133,836	1,099,000	82,629
6	Kab. Cilacap	421,187	278,508	1,197,315	108,157
7	Kab. Grobogan	353,074	143,586	906,666	104,304
8	Kab. Jepara	158,799	133,778	814,380	67,487
9	Kab. Karanganyar	148,479	161,716	810,217	55,203
10	Kab. Kebumen	286,959	131,482	1,021,871	79,064
11	Kab. Klaten	186,884	115,441	1,066,318	61,175
12	Kab. Magelang	108,604	173,254	899,528	43,096
13	Kab. Pati	203,474	169,127	960,479	72,903
14	Kab. Pemasang	249,976	136,362	931,427	63,505
15	Kab. Purbalingga	112,767	122,859	719,185	66,641
16	Kab. Purworejo	180,854	127,566	793,905	53,323
17	Kab. Rembang	135,448	126,808	640,273	42,099
18	Kab. Semarang	227,584	215,680	778,605	59,113
19	Kab. Sragen	141,264	146,722	869,156	61,858
20	Kab. Tegal	215,975	156,245	957,576	72,525
21	Kab. Temanggung	103,806	102,080	651,172	41,628
22	Kab. Wonogiri	192,049	111,593	917,477	75,706
23	Kab. Wonosobo	138,195	108,730	665,548	57,950
24	Kota Magelang	142,589	107,740	385,859	20,644
25	Kota Pekalongan	131,316	114,252	384,489	34,721
26	Kota Salatiga	69,204	106,100	358,332	16,959
27	Kota Semarang	591,011	925,919	1,054,003	14,993
28	Kota Surakarta	244,976	298,401	659,647	32,893

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
(dalam jutaan rupiah)

No.	Kab/Kota	Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Dana Alokasi Umum(X ₂)	Dana Alokasi Khusus (X ₃)
1	Kab. Banjarnegara	206,494	161,653	826,044	61,066
2	Kab. Banyumas	360,165	435,598	1,224,711	82,519
3	Kab. Blora	335,137	144,724	823,874	823,874
4	Kab. Boyolali	303,853	227,516	934,220	81,096
5	Kab. Brebes	282,972	267,771	1,186,970	97,975
6	Kab. Cilacap	414,435	374,024	1,291,122	110,204
7	Kab. Grobogan	300,522	235,295	977,676	85,839
8	Kab. Jepara	188,924	231,673	887,769	81,294
9	Kab. Karanganyar	223,288	215,299	870,002	57,239
10	Kab. Kebumen	465,778	242,080	1,125,569	80,709
11	Kab. Klaten	268,557	177,922	1,142,587	66,576
12	Kab. Magelang	319,022	242,449	965,124	48,736
13	Kab. Pati	224,653	279,255	1,043,498	79,853
14	Kab. Pemasang	164,389	217,345	1,016,813	54,019
15	Kab. Purbalingga	112,250	202,594	777,989	57,267
16	Kab. Purworejo	216,763	200,259	854,737	57,025
17	Kab. Rembang	151,455	165,531	700,775	46,206
18	Kab. Semarang	272,265	248,213	848,736	67,407
19	Kab. Sragen	267,219	254,392	946,827	76,469
20	Kab. Tegal	226,088	253,717	1,044,211	63,647
21	Kab. Temanggung	198,452	160,727	708,765	56,703
22	Kab. Wonogiri	223,888	182,149	1,001,378	59,392
23	Kab. Wonosobo	206,098	175,319	724,245	59,423
24	Kota Magelang	127,622	164,928	417,211	22,366
25	Kota Pekalongan	159,183	144,065	412,871	34,174
26	Kota Salatiga	120,273	165,748	399,083	24,043
27	Kota Semarang	800,181	1,138,367	1,104,739	29,237
28	Kota Surakarta	286,492	335,660	710,804	43,848

LAMPIRAN

Lampiran 2

Hasil Analisis Regresi

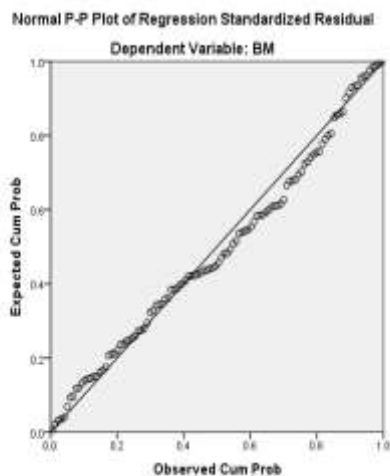
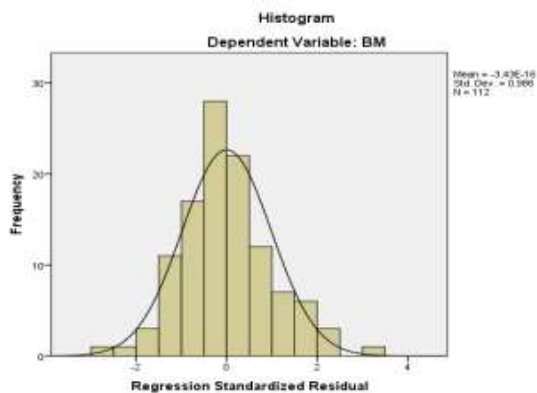
1. Rangkuman Data Khusus

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	112	66386.00	800181.00	201559.2411	108115.56122
PAD	112	60611.00	1138367.00	172867.6161	153523.59279
DAU	112	262653.00	1291122.00	762873.9107	226873.48804
DAK	112	14993.00	823874.00	70865.4911	75066.99975
Valid N (listwise)	112				

2. Uji Normalitas

a) Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	54401.89817859
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.838
Asymp. Sig. (2-tailed)		.484

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b) Uji Multikolinieritas

Coefficient Correlations^a

Model		DAK	PAD	DAU	
1	Correlations	DAK	1.000	.161	-.273
		PAD	.161	1.000	-.457
		DAU	-.273	-.457	1.000
	Covariances	DAK	.005	.000	.000
		PAD	.000	.001	.000
		DAU	.000	.000	.001

a. Dependent Variable: BM

c) Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.864 ^a	.747	.740	55152.30464	1.856

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

d) Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13393.269	11449.886		1.170	.245
PAD	.033	.024	.142	1.368	.174
DAU	.032	.016	.207	1.952	.054
DAK	-.032	.045	-.068	-.717	.475

a. Dependent Variable: ABSRES

3. Regresi Linier Sederhana

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.614	.610	67508.89224

a. Predictors: (Constant), PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	106197.036	9630.584		11.027	.000
	PAD	.552	.042	.783	13.217	.000

a. Dependent Variable: BM

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.658 ^a	.433	.428	81769.24419

a. Predictors: (Constant), DAU

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-37702.379	27217.153		-1.385	.169
DAU	.314	.034	.658	9.168	.000

a. Dependent Variable: BM

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.166 ^a	.028	.019	107092.29693

a. Predictors: (Constant), DAK

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	184578.857	13945.593		13.236	.000
DAK	.240	.135	.166	1.770	.080

a. Dependent Variable: BM

4. Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.747	.740	55152.30464

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	968964293837. 340	3	322988097945. 780	106.184	.000 ^b
Residual	328511884323. 151	108	3041776706.69 6		
Total	1297476178160 .491	111			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15527.134	18526.054		-.838	.404
PAD	.446	.039	.633	11.543	.000
DAU	.167	.027	.350	6.263	.000
DAK	.182	.072	.126	2.522	.013

a. Dependent Variable: BM